



**PANITIA HUT ke-70
IKATAN HAKIM INDONESIA**

d/a : Sekretariat PP. IKAH I - MA RI
Jln. Medan Merdeka Utara 9-13
Telepon/WA: 0813 6682 1939
Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 10 Maret 2023

Nomor : 60/PP.IKAHI/III/2023
Lampiran : 2 (dua) Rangkap
Perihal : **Undangan Seminar Internasional
HUT ke-70 IKAH I**

Kepada YM dan Yth:
Bapak/Ibu
(Daftar Terlampir)
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-70 IKAH I Tahun 2023, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAH I), bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Federal Court of Australia yang didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice-2 (AIPJ-2) mengundang Bapak/Ibu untuk menjadi peserta dalam acara Seminar Internasional Penanganan Perkara Komersial, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang: Tren dan Pembelajaran dari Berbagai Negara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Maret 2023;
Tempat : Ruang Serbaguna Timor, Hotel Borobudur (khusus undangan)
Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Pasar Baru, Kecamatan
Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai;
Pakaian : Batik

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kehadiran Bapak/Ibu sangat kami harapkan. Mengenai konfirmasi kehadiran dapat mengisi melalui utasan <https://forms.gle/wxWj8SQ88m7RYUhM6>. Konfirmasi kehadiran paling lambat Panitia terima pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 pukul 24.00 WIB.

Hal-hal lainnya yang berhubungan dengan acara Seminar Internasional ini dapat menghubungi Narahubung acara terkait yaitu Selviana Purba di Nomor HP: +628111287890, email: selvianapoerba@yahoo.com atau Armansyah di Nomor HP: +628126820045.

Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

PANITIA HUT KE-70 IKAH I

Ketua Panitia,

Sekretaris Panitia,

  
Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao, S.H., M.H. Dr. Abdurrahman Rahim, S.H., M.H.

Ketua PP IKAH I,




Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Lampiran I

TERM OF REFERENCE

“Seminar Internasional Penanganan Perkara Komersial, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang: Tren dan Pembelajaran dari Berbagai Negara”

A. Latar Belakang

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang di Indonesia pertama kali diatur dalam *Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348* yang diwarisi dari era kolonial pada awal abad ke-20. Sejak itu peraturan tersebut telah diubah sebanyak dua kali, pertama pada tahun 1998 sebagai respon atas krisis ekonomi, dan kedua pada tahun 2004 dengan UU No. 37/2004. Meskipun telah diamandemen, hampir semua prosedur dan prinsip masih mengadopsi sistem lama dan Indonesia masih mempertahankan rezim kepailitan yang relatif sederhana seperti yang pertama kali ditetapkan oleh *Verordening*. Pemerintah sejak tahun 2016 telah menyiapkan Naskah Akademik dan RUU untuk menyempurnakan UU No. 37 Tahun 2004. Pembahasan dilakukan secara rutin dan sampai saat ini RUU tersebut masih dibahas oleh pemerintah.

Di ranah global, banyak negara telah mengembangkan prosedur Kepailitan dan restrukturisasi dalam beberapa tahun terakhir untuk menyesuaikan tekanan ekonomi yang disebabkan pandemi, dan yang terbaru adalah pengembangan sebagai dampak perang di Ukraina. Berbagai peraturan dan kelembagaan disempurnakan untuk menciptakan infrastruktur hukum yang sehat dan kokoh tidak hanya untuk merespon, tetapi juga membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi.

Memasuki tahun 2023, tantangan belum usai. IMF menunjukkan pada Kuartal 4 2022, aktivitas ekonomi global mengalami perlambatan yang lebih luas dan tajam dari perkiraan, dengan inflasi lebih tinggi yang terlihat dalam beberapa dekade. Pertumbuhan global yang diperkirakan melambat dari 6,0 persen pada 2021 menjadi 3,2 persen pada 2022 dan 2,7 persen pada 2023. Hal ini menunjukkan profil pertumbuhan terlemah sejak 2001 kecuali krisis keuangan global dan fase pandemi COVID-19.¹

Pengalaman negara lain dalam melakukan reformasi kerangka kerja dan kelembagaan untuk kepailitan dan restrukturisasi utang sangat relevan bagi Indonesia yang saat sedang dalam proses melakukan amandemen peraturan terkait. Selain itu, pada seminar ini juga dapat mendiskusikan pilihan-pilihan mekanisme yang digunakan negara lain dalam menyelesaikan kepailitan dan restrukturisasi utang serta perkembangan terkini terkait kerjasama dalam kepailitan lintas batas. Selain itu, secara global dapat diketahui bahwa dalam 15 tahun terakhir negara-negara lain berlomba-lomba memperkenalkan pengadilan niaga internasional. Studi oleh Kramer dan Sorabji pada tahun 2019 menguraikan bahwa pada tahun 2019 setidaknya ada 10 yurisdiksi memperkenalkan Pengadilan Niaga Internasional, sebagai pengadilan spesialis yang menangani sengketa komersial secara komprehensif.²

Melihat perkembangan tersebut, Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan IKAHI dan *Federal Court of Australia* menyelenggarakan seminar untuk mendiskusikan tren dan pembelajaran penanganan perkara komersial, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Seminar akan dihadiri narasumber yang berasal dari perwakilan Mahkamah Agung Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, *Federal of Australia*, Mahkamah Agung Singapura, dan *International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals (INSOL)*.

B. Hari, Tanggal dan Tempat

Tanggal : Senin, 20 Maret 2023.

Waktu : 13.30-17.45 WIB.

Tempat : Hotel Borobudur Jakarta, Indonesia.

¹ IMF, World Economic Outlook, Countering the Cost-of-Living Crisis, October 2022.

² *Competition for Justice?* Erasmus Law Review, 1, (2019):1-9, this to include Dubai, Qatar, Singapore, Abu Dhabi, Kazakhstan, China and also in Germany, France, Netherlands, Belgium and Switzerland

C. Tujuan

1. Untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang trend dan pembelajaran dalam penanganan kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang serta perkara komersial lainnya antara negara satu dengan negara lainnya.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penanganan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kasus komersial lainnya.

D. Peserta

1. Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)
2. Komunitas Hukum dan Bisnis Indonesia
3. Hakim Pengadilan Niaga
4. Asosiasi (AKPI, IKAPI, HKPI)
5. Asosiasi Advokat (PERADI, KAI, dll)
6. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Bappenas (Direktorat Hukum dan Regulasi)
9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
10. Kementerian Keuangan (Biro Hukum)
11. Otoritas Jasa Keuangan
12. Bank Indonesia
13. Kantor Lelang
14. Asosiasi Asuransi
15. Akademisi Hukum Bisnis, khususnya kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang
16. Kelompok Kerja EODB MA RI
17. Kelompok Kerja Persaingan Usaha MA RI

E. Narasumber/Moderator :

E.1 Narasumber/Lembaga:

1. Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dalam konfirmasi)
2. The Hon. James LB Allsop, (Chief Justice of The Federal Court of Australia).
3. The Hon. Aedit Abdullah, (Singapore Supreme Court).
4. Mr. Scott Atkins, President INSOL International (*International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals*).
5. Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia).

E.2 Moderator

Prof. Dr Ningrum N Sirait, S.H., M.LI.

F. Keluaran

Laporan prosiding seminar dengan poin-poin penting pembelajaran tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang di negara lain dan rekomendasi tentang hal-hal yang dapat dipertimbangkan Indonesia dalam mengembangkan kerangka kerja kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang serta perkara komersial lainnya.

G. Rundown Acara

13.00 – 14.00	Makan Siang dan Pendaftaran
14.10 – 14.30	Pembukaan oleh MC, Lagu Kebangsaan Indonesia dan Doa
14.30 – 14.35	Sambutan Pembukaan : Ketua IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia)
14.35 – 14.40	Sambutan Pembukaan : Perwakilan dari Kedutaan Besar Australia di Indonesia
14.40 – 14.45	Sambutan Pembukaan : Perwakilan dari Asian Development Bank
14.45 – 14.55	Sambutan Pembukaan: Ketua Mahkamah Agung RI
14.55 – 15.00	- Sesi Foto VIPs di pandu oleh MC dan Perkenalan Moderator – MC menyerahkan acara ke Moderator, Perkenalan Para Pembicara oleh Moderator

15.00 – 15.15	<p>Pembicara Pertama : Yang Terhormat Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana amandemen peraturan perundang-undangan terkait hukum ekonomi (e.g. Prosedur Hukum Perdata, Kepailitan dan peraturan hukum terkait perkara komersial) 2. Penilaian pemerintah tentang perlunya suatu pengadilan khusus untuk menangani perkara komersial di luar kepailitan, HKI dan hukum persaingan usaha.
15.15 – 15.30	<p>Pembicara Kedua: Yang Mulia James L B Allsop, Chief Justice of The Federal Court of Australia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman dan pembelajaran Australia dalam menangani kasus komersial (Pengadilan Niaga dan mengapa suatu negara membutuhkan pengadilan komersial). 2. Pengalaman Australia dalam merevitalisasi hukum dan mekanisme kepailitan.
15.30 – 15.45	<p>Pembicara Ketiga: Yang Mulia Aedit Abdullah, Singapore Supreme Court</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman dan pembelajaran Singapura dalam menangani kasus komersial (misalnya pendirian pengadilan niaga) 2. Pengalaman Singapura dalam merevitalisasi kepailitan dan restrukturisasi selama pandemi.
15.45 – 16.00	<p>Pembicara Keempat: Perwakilan dari INSOL (dalam konfirmasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tren global dan pembelajaran dalam menangani kasus komersial (mengapa pengadilan niaga penting) 2. Model hukum dan tren global penanganan perkara kepailitan (misalnya kepailitan lintas batas negara)
16.00 – 16.15	<p>Pembicara Kelima: Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha (Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi adanya pengadilan khusus dalam penanganan perkara niaga. 2. Prakarsa pengadilan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam penyelesaian kepailitan.
16.15 – 17.15	Tanya Jawab
17.15 – 17.20	Sesi Foto Penyerahan Sertifikat kepada Peserta secara Simbolik
17.20 – 17.30	Penutupan

Lampiran II

DAFTAR UNDANGAN

A. Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Para Pimpinan dan Para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia:

1. Yang Mulia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia).
2. Yang Mulia Dr. H. Sunarto, S.H., M.H (Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial).
3. Yang Mulia Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. (Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia).
4. Yang Mulia Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. (Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia).
5. Yang Mulia Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia).
6. Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia).
7. Yang Mulia Prof.Dr. H. Amran Suadi, SH. MH., M.M. (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia).
8. Yang Mulia Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. (Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia).
9. Yang Mulia I Dr. H. Yulius, S.H., M.H. (Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia).
10. Yang Mulia Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
11. Yang Mulia Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
12. Yang Mulia Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
13. Yang Mulia Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
14. Yang Mulia Maria Anna Samiyati, S.H., M.H(Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
15. Yang Mulia Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
16. Yang Mulia Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
17. Yang Mulia Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
18. Yang Mulia Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
19. Yang Mulia Hj. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).

20. Yang Mulia Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).
21. Yang Mulia Dr. Nani Indrawati, SH., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia).

- **Para Pimpinan Pengurus Pusat IKAHI:**

22. Yang Mulia Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum (Ketua Pengurus Pusat IKAHI).
23. Yang Mulia H. Suharto, S.H., M.Hum. (Ketua I Pengurus Pusat IKAHI).
24. Yang Mulia Dr. Drs. H. Abdul Manaf, M.H. (Ketua II Pengurus Pusat IKAHI).
25. Yang Mulia Hidayat Manao, S.H., M.H. (Ketua III Pengurus Pusat IKAHI).
26. Yang Mulia Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. (Ketua IV Pengurus Pusat IKAHI).

- **Para Pejabat Eselon I dan Struktural Mahkamah Agung Republik Indonesia:**

27. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.
28. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
29. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
30. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
31. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
32. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
33. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
34. Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
35. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia.
36. Panitera Muda Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
37. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia.
38. Panitera Muda Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
39. Panitera Muda Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia.
40. Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
41. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
42. Bapak Dr. Zulfahmi, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia).

- **Para Pemilah Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia:**

43. Ibu Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum.
44. Bapak Albertus Usada, S.H., M.H.
45. Ibu Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

- **Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Negeri:**

46. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
47. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
48. Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
49. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
50. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

51. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
52. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
53. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
54. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.
55. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
56. Ketua Pengadilan Negeri Depok.
57. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.
58. Ketua Pengadilan Negeri Bogor.

- **Para Perwakilan Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:**

59. Ibu Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.
60. Bapak Yusuf Pranowo, S.H., M.H.
61. Ibu R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.
62. Bapak Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.
63. Bapak Heru Hanindyono, S.H., M.H.

- **Seksi Acara Seminar Internasional HUT IKAHI:**

64. Ibu Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
65. Ibu Selviana Purba, S.H., LL.M.
66. Bapak Dr. Khoirul Anwar, S.H., M.H.
67. Bapak Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.
68. Bapak Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.
69. Bapak Dr. Armansyah, L.c. M.H.
70. Bapak Cundo Subhan, S.H., M.H.
71. Ibu Lucia Ridayanti, S.H., M.H.
72. Ibu Sri Endang T. Asmarani, S.H., M.H.
73. Bapak Pranata Subhan S.H., M.H.
74. Bapak Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.
75. Ibu Suci Bela Nur.

- **Tim AIPJ2:**

76. Bapak Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.
77. Ibu Nisa Istiani, S.H., M.LI.
78. Bapak Yunani Abiyoso, S.H., M.H.
79. Bapak Rachmat Ariwijaya, S.H., M.Si.
80. Ibu Dessi Aryani

B. Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia:

81. Bapak Dr. Sugeng Purnomo (Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia).

82. Bapak Septian Hario Seto S.E., M.B.A. (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia).
83. Bapak Elen Setiadi S.H., M.SE. (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia).
84. Bapak Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Carlo Brix Tewu (Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia).
85. Bapak Dr. M. Afif Hasbullah S.H. M.Hum., (Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia).
86. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional).
87. Bapak Prof. Dr. Asep N. Mulyana S.H., M.Hum., (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
88. Bapak Cahyo Rahadian Muzhar S.H., LL.M., (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
89. Bapak Rionald Silaban S.H., LL.M. (Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
90. Bapak Ichsan Zulkarnaen S.E, M.B.A, Ph.D., (Asisten Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia).
91. Bapak R.M. Dewo Broto Joko P S.H., LL.M. (Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia).
92. Ibu Dr. Yuliana S.H., M.B.A. (Kepala Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia).
93. Bapak Dr. Anung Herlianto, S.E., Akt., CA., M.B.A. (Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia).
94. Bapak Dr. Yagus Suyadi S.H., M.Si (Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia).
95. Ibu Rosalia Suci Handayani S.H., LL.M. (Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia).
96. Ibu Tanti Dian Ruhama S.H., M.H. (Kepala Sub Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia).
97. Bapak Reza Faraby S.H., LL.M. (Kepala Sub Direktorat Penerapan dan Penegak Hukum dan HAM Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia).
98. Bapak Mohamad Reza SH., M.H. (Staf Ahli Bidang Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia).

C. Kedutaan Besar Australia & DFAT & Organizations:

99. Mrs. Ade Ganie (*Unit Manager Justice and Democratic Governance Australian Embassy Jakarta*).
100. Mr. Alex Oates (*First Secretary, Justice and Democratic Governance Australian Embassy Jakarta*).
101. Mr. Craig Ewers (*Team Leader Australian Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)*).

102. Mr. Peter Riddle-Carre (Deputy Team Leader Australian Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)).
103. Mr. Achmad Shauki (Senior Trade and Investment Adviser Prospera).
104. Mrs. Feitty Pandjaitan Indonesia (Legal & Regulatory Adviser Katalis).
105. Mr. Nick Moller (Principal Counsel ADB (Asian Development Bank)).
106. Mr. Alexandre Hugo Laure (Private Sector Coordinator for Indonesia and Timor Leste World Bank).

D. Perwakilan Universitas/Asosiasi/Forum Indonesia:

107. Bapak Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
108. Bapak Teguh Dartanto, Ph.D., (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).
109. Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie S.H., M.A., M.H., (Dekan Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayutullah).
110. Bapak Dr. Ir. Sutrisno Iwantono (Mantan Komisioner KPPU/Asosiasi Pengusaha Indonesia Asosiasi Pengusaha Indonesia).
111. Bapak Asep Ridwan S.H., M.H. (Ketua Perwakilan Asosiasi Pengacara Persaingan Usaha Indonesia).
112. Bapak M. Arsaj Rasjid P.M. (Ketua Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia).
113. Ibu Dr. Siti Anisa S.H., M.Hum. (Sekertaris Perwakilan Forum Dosen Persaingan Usaha Indonesia).
114. Bapak H. Sutrisno S.H., M.Hum. (Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)).
115. Bapak Imran Nating S.H., M.H. (Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)).
116. Bapak Prof. Dr. Otto Hasibuan S.H., M.M. (Ketua Umum PERADI).
117. Bapak Dr. Hotma Sitompul S.H., M.Hum. (Ketua PERADI Suara Advokat).
118. Bapak Dr. Luhut M. P. Pangaribuan S.H., LL.M. (Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Rumah Bersama).
119. Bapak Dr. H. Sutrisno, S. Ag., S.H., M.H. (Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI)).
120. Bapak Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. (Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan Periode (APHK)).